



Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah sebagai Penyebab Kesenjangan Pendapatan di Indonesia (Studi Kasus : Papua dan Nusa Tenggara Timur)

Lokot Muda Harahap^{1*}, Tressia Anjelina Manalu², Sri Rahayu Sinaga³, Gita Tri Novel Pandiangan⁴

¹⁻⁴ Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: lokotmudahrp@unimed.ac.id^{1*}, manalutressia@gmail.com², srihayusinaga0@gmail.com³, gitatrinovelpandiangan@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi : lokotmudahrp@unimed.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the relationship between regional development disparities and income inequality in Indonesia, focusing on Papua and East Nusa Tenggara (NTT). The method used is a literature study with a descriptive approach based on secondary data from official websites and scientific articles. The results of the study show that development disparities in both regions are influenced by limitations in physical and digital infrastructure, low quality of human resources, and limited opportunities for productive employment. These conditions hinder the integration of disadvantaged regions into the national economic system and reinforce the poverty trap, which has an impact on income distribution inequality. In addition, economic growth has not been inclusive, so that its benefits have not been felt equally by the entire community. Therefore, development policies are needed that emphasize equitable infrastructure distribution, improved quality of education and health, and optimization of targeted fiscal interventions. Inclusive and sustainable development strategies are key to reducing income inequality while strengthening national economic stabil.*

Keywords: *Inclusive Development; Income Gap; Regional Inequality; Regional Poverty; Spatial Inequality.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara ketimpangan pembangunan antarwilayah dan kesenjangan pendapatan di Indonesia dengan fokus pada Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif berdasarkan data sekunder dari website resmi dan artikel ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa disparitas pembangunan di kedua wilayah dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur fisik dan digital, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya kesempatan kerja produktif. Kondisi tersebut menghambat integrasi wilayah tertinggal ke dalam sistem ekonomi nasional dan memperkuat perangkap kemiskinan yang berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum bersifat inklusif sehingga manfaatnya belum dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang menekankan pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi intervensi fiskal yang tepat sasaran. Strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan pendapatan sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Kata Kunci: Kemiskinan Regional; Ketimpangan Spasial; Ketimpangan Wilayah; Kesenjangan Pendapatan; Pembangunan Inklusif.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, melibatkan transformasi mendasar dalam struktur sosial dan kelembagaan nasional guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Todaro & Smith, 2020). Namun demikian, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan serius berupa ketimpangan pembangunan antarwilayah yang cukup tajam. Nur et al., (2025) mengemukakan bahwa Indonesia mencatat laju ketimpangan pendapatan tercepat di kawasan Asia Tenggara dan berada pada posisi keenam tertinggi di dunia dalam hal disparitas ekonomi. Situasi ini semakin memburuk akibat pertumbuhan

ekonomi yang belum inklusif, sehingga manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil.

Ketimpangan tersebut tampak jelas di kawasan Indonesia Timur, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. Di et al., (2025) menjelaskan bahwa NTT secara berkelanjutan mencatat nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, mencerminkan kendala signifikan dalam akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kesenjangan di dalam wilayah NTT sendiri juga cukup lebar, di mana daerah pusat pertumbuhan seperti Kota Kupang memiliki IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Di sisi lain, Indeks et al., (2025) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di NTT belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan maupun mengurangi ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) secara merata di seluruh kabupaten/kota.

Permasalahan ketimpangan ini umumnya berakar pada tingginya tingkat pengangguran serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jan et al., (2026) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan yang kuat dengan pelebaran kesenjangan pendapatan di berbagai provinsi. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Pandina, (2023) yang menyatakan bahwa kemiskinan dan ketimpangan di daerah seperti NTT dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi yang kompleks, termasuk terbatasnya ketersediaan lapangan kerja yang produktif. Apabila kondisi ini terus berlanjut, Kebijakan & Data, (2025) memperingatkan bahwa ketimpangan pembangunan berpotensi menimbulkan sentimen kedaerahan yang dapat mengancam stabilitas politik dalam jangka panjang.

Data dari Indonesia Investments (2023) semakin menegaskan kondisi tersebut dengan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan Papua dan NTT masih menjadi yang tertinggi secara nasional jika dibandingkan dengan kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi faktor utama penyebab kesenjangan pendapatan, dengan mengambil studi kasus di Papua dan NTT. Melalui pendekatan pertumbuhan yang inklusif, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang mampu mengintegrasikan daerah tertinggal ke dalam arus utama pembangunan nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah

Dalam literatur ekonomi pembangunan klasik, teori pertumbuhan Neoklasik (Solow) sering kali menempatkan akumulasi modal dan pertumbuhan output agregat sebagai tujuan utama. Namun, pergeseran paradigma dalam studi kontemporer menekankan bahwa

pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup. Diskusi terkini menyoroti pentingnya kualitas pertumbuhan yang tidak hanya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga mendistribusikan manfaatnya secara adil. Kritik utama terhadap model pertumbuhan tradisional adalah pengabaian dimensi pemerataan, di mana pertumbuhan yang tinggi terbukti tidak otomatis menjamin kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayahwilayah yang tertinggal secara geografis dan infrastruktur (A.A. Ngurah Gede, 2022).

Merespons kegagalan trickledown effect tersebut, jurnaljurnal ilmiah periode 2020–2025 mendefinisikan ulang pembangunan wilayah sebagai konsep "Pembangunan Inklusif". Konsep ini mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan dengan tujuan eksplisit untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah (Susilowati et al., 2025). Indikator keberhasilan pembangunan kini bergeser dari sekadar angka PDRB menjadi parameter yang lebih multidimensi, mencakup pemerataan pendapatan, kualitas modal manusia, dan akses terhadap layanan dasar (A.A. Ngurah Gede et al., 2024).

Lebih jauh, studi empiris terbaru juga mulai mengadopsi konsep inclusive green growth, yang menegaskan bahwa pembangunan di wilayah berkembang harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial (Asyrof & Rizaldi, 2025). Dalam konteks ini, ketimpangan pembangunan terjadi ketika suatu wilayah gagal menciptakan pertumbuhan yang inklusifyakni pertumbuhan yang mampu memperluas kesempatan kerja dan meratakan manfaat ekonomi (Susilowati et al., 2025). Kegagalan ini menjadi landasan teoritis mengapa disparitas pembangunan antarwilayah dapat memicu kesenjangan pendapatan yang persisten.

Disparitas Pembangunan Antarwilayah

Dalam diskursus ekonomi regional terkini, pemetaan ketimpangan pembangunan di Indonesiakhususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih secara dominan menggunakan pendekatan Indeks Williamson dan Indeks Theil. Studi terbaru oleh (Awalia et al., 2024) yang menganalisis periode 2017–2021 mengonfirmasi bahwa disparitas pembangunan di KTI masih berada pada kategori tinggi. Secara spesifik, provinsi kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur dan wilayah dengan tantangan geografis berat, seperti Papua dan Papua Barat konsisten menunjukkan indeks ketimpangan yang ekstrem dibandingkan rata-rata nasional. Temuan ini diperkuat oleh riset Mursalin & Irawan (2025) pada 509 kabupaten/kota, yang menyimpulkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal telah berjalan, pola divergensi ekonomi antarwilayah tetap persisten, terutama di luar Pulau Jawa.

Literatur empiris periode 2020–2025 mengidentifikasi pergeseran determinan ketimpangan. Faktor penyebab tidak lagi hanya terbatas pada infrastruktur fisik, tetapi telah meluas ke kesenjangan digital dan kualitas modal manusia. Awalia et al., (2024) menemukan bahwa akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki korelasi kuat dengan tingkat disparitas, di mana daerah dengan investasi TIK rendah cenderung tertinggal dalam integrasi pasar nasional. Senada dengan itu, kualitas sumber daya manusia yang diprosikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi penentu krusial lainnya, di mana provinsi dengan IPM rendah mengalami kesulitan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi (Rachmawati et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan aksesibilitas baik fisik maupun digital menciptakan hambatan struktural bagi masuknya investasi ke wilayah tertinggal.

Konsekuensi dari disparitas wilayah yang berkepanjangan ini sangat serius bagi stabilitas pembangunan nasional. Mursalin & Irawan (2025) menekankan bahwa ketimpangan pendapatan per kapita antarwilayah yang tidak tertangani dapat menghambat pertumbuhan inklusif dan memicu inefisiensi dalam kebijakan otonomi daerah. Dengan demikian, disparitas pembangunan antarwilayah bukan sekadar fenomena statistik, melainkan akar masalah yang secara langsung mentransmisikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.

Dinamika Kesenjangan Pendapatan dan Peran Intervensi Fiskal

Analisis literatur ekonomi pembangunan terkini menyoroti bahwa tren ketimpangan pendapatan di Indonesia pascapandemi (2020–2024) masih menunjukkan fluktuasi yang signifikan antarwilayah. Studi panel data terbaru mengidentifikasi bahwa variabel makroekonomi seperti upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi daerah memiliki pengaruh deterministik terhadap pergerakan Rasio Gini (Jan et al., 2026).

Secara teoritis dan empiris, ketimpangan pendapatan memiliki korelasi positif yang kuat dengan tingkat kemiskinan. Diyah & Nafisyah (2024) menemukan bahwa peningkatan Rasio Gini di Indonesia cenderung diikuti oleh eskalasi tingkat kemiskinan, yang dimediasi oleh hambatan struktural seperti rendahnya akses pendidikan dan kesempatan kerja. Temuan ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak akan efektif tanpa dibarengi kebijakan yang secara simultan menekan disparitas distribusi pendapatan.

Dalam merespons tantangan tersebut, peran instrumen fiskalkhususnya bantuan sosial (social assistance) menjadi krusial. Evaluasi terhadap kebijakan fiskal di 34 provinsi selama periode 2018–2024 menunjukkan bahwa bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap penurunan Rasio Gini, yang berarti intervensi negara efektif dalam merealisasikan redistribusi pendapatan (Sabila et al., 2025). Meskipun demikian, efektivitas intervensi ini sangat bergantung pada kapasitas tata kelola lokal. Sarjito (2024) menekankan bahwa faktor kelembagaan dan ketepatan sasaran administrasi menjadi prasyarat mutlak agar kebijakan sosial mampu mereduksi ketimpangan ganda (kemiskinan dan kesenjangan) secara optimal.

Transmisi Ketimpangan Pembangunan terhadap Distribusi Pendapatan

Bukti empiris terkini mengonfirmasi bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah berkorelasi signifikan dengan distribusi pendapatan masyarakat di Indonesia. Studi panel data menunjukkan bahwa disparitas akses terhadap infrastruktur vital seperti kelistrikan, transportasi, dan telekomunikasi berkaitan langsung dengan variasi ketimpangan pendapatan antarprovinsi. Fatimah et al., (2024) secara spesifik menemukan bahwa infrastruktur telekomunikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap income inequality, di mana akses digital yang tidak merata memperlebar kesenjangan peluang ekonomi. Temuan ini sejalan dengan riset Indah Nidyawati et al., (2024) yang menyoroti bahwa meskipun beberapa jenis infrastruktur berdampak positif terhadap pertumbuhan, efek distribusinya cenderung bias ke wilayah yang sudah maju, sehingga memperburuk ketimpangan di daerah tertinggal.

Dalam konteks teoritis, fenomena ini memicu kritik tajam terhadap relevansi Trickle Down Effect di Indonesia. Rahayu & Muta'ali (2024) mengungkapkan bahwa pola spasial pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan gagal menyebarkan manfaat ekonomi ke daerah sekitarnya (hinterland) secara efektif. Alih-alih menciptakan efek tetesan ke bawah, pusat pertumbuhan cenderung memperkuat akumulasi kesejahteraan di titik asalnya, sementara wilayah terpencil (remote area) tetap terpinggirkan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menurunkan ketimpangan struktural jika tidak disertai dengan pemerataan akses layanan dasar (Simanjuntak & Solihin, 2025).

Kegagalan transmisi kesejahteraan ini kemudian menciptakan mekanisme poverty trap (perangkap kemiskinan) di daerah tertinggal. Keterbatasan infrastruktur fisik menghambat mobilitas tenaga kerja dan akses pasar, yang pada gilirannya menekan produktivitas dan pendapatan riil masyarakat lokal. Simanjuntak & Solihin (2025) menjelaskan bahwa kondisi ini melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi karena minimnya investasi produktif yang masuk. Di sisi lain, rendahnya penetrasi teknologi informasi membatasi akses masyarakat terhadap peluang kerja dan layanan keuangan formal, yang secara kolektif memperdalam jurang pendapatan antara wilayah maju dan tertinggal (Indah Nidyawati et al., 2024).

Dengan demikian, ketimpangan infrastruktur bukan sekadar isu teknis pembangunan fisik, melainkan mekanisme transmisi struktural yang menentukan pola distribusi pendapatan. Pemerataan pembangunan menjadi prasyarat mutlak untuk mendorong pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*), di mana manfaat ekonomi dapat dinikmati secara proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi dan artikel daring yang telah mempublikasikan data terkait pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber informasi di internet (Google) yang relevan dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah, khususnya di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Sumber data yang digunakan berupa laporan, artikel ilmiah, serta berita ekonomi yang telah menyajikan data statistik terkait tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata serta dampaknya terhadap kesenjangan pendapatan antarwilayah di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realita Disparitas Pembangunan di Papua dan NTT

Disparitas pembangunan antarwilayah di Indonesia menunjukkan pola yang konsisten menempatkan Kawasan Timur Indonesia sebagai wilayah dengan tingkat ketertinggalan relatif tinggi. Temuan empiris terbaru menegaskan bahwa ketimpangan regional di Indonesia masih berada pada kategori signifikan, khususnya di luar Pulau Jawa (Nur et al., 2025; Awalia et al., 2024). Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan dua provinsi yang secara konsisten mencatat indikator pembangunan manusia di bawah rata-rata nasional. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kedua wilayah tersebut mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang produktif.

Di NTT, ketimpangan tidak hanya terjadi antarprovinsi, tetapi juga intra-wilayah. Kota Kupang sebagai pusat pertumbuhan menunjukkan capaian IPM dan aktivitas ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya, sehingga menciptakan dualisme pembangunan dalam satu provinsi (Indeks et al., (2025)). Papua menghadapi tantangan serupa namun dengan karakteristik geografis yang lebih ekstrem. Data menegaskan bahwa tingkat

kemiskinan di wilayah perdesaan Papua masih menjadi yang tertinggi secara nasional jika dibandingkan dengan kawasan perkotaan, termasuk di Pulau Jawa (Indonesia Investments, 2023). Kondisi ini memperbesar biaya logistik dan mempersempit akses terhadap infrastruktur dasar bagi masyarakat pedalaman.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi agregat belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Kritik terhadap paradigma pertumbuhan konvensional sebagaimana dikemukakan dalam literatur pembangunan menunjukkan bahwa peningkatan output regional semata tidak menjamin distribusi manfaat yang adil (Todaro & Smith, 2020). Dengan demikian, realita di Papua dan NTT menguatkan argumen bahwa ketimpangan pembangunan merupakan fenomena struktural yang melampaui sekadar perbedaan angka PDRB.

Mekanisme Transmisi: Dari Infrastruktur Fisik dan Digital ke Kesenjangan Pendapatan

Ketimpangan pembangunan di Papua dan NTT tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja melalui mekanisme transmisi yang konkret terhadap distribusi pendapatan. Literatur empiris menunjukkan bahwa disparitas infrastruktur baik fisik maupun digital, memiliki korelasi signifikan dengan ketimpangan pendapatan antarwilayah (Fatimah et al., 2024; Indah Nidyawati et al., 2024). Infrastruktur transportasi, kelistrikan, dan telekomunikasi yang tidak merata membatasi integrasi wilayah tertinggal ke dalam pasar nasional.

Di Papua dan sebagian besar wilayah NTT, keterbatasan akses jalan, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi menyebabkan biaya ekonomi menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah maju. Akibatnya, pelaku usaha lokal menghadapi hambatan dalam distribusi barang, akses pembiayaan, serta adopsi teknologi. Ketimpangan digital (*digital divide*) semakin memperlebar jurang tersebut, karena rendahnya penetrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengurangi peluang masyarakat untuk mengakses pasar daring, layanan keuangan, maupun informasi produktif (Awalia et al., 2024).

Fenomena ini mempertegas kritik terhadap konsep *trickle-down effect*. Pertumbuhan yang terkonsentrasi di pusat kota atau wilayah tertentu tidak secara otomatis menyebar ke daerah *hinterland* (Rahayu & Muta'ali, 2024). Sebaliknya, pusat pertumbuhan cenderung mengakumulasi modal, investasi, dan tenaga kerja terampil di satu titik, sehingga memperdalam ketimpangan spasial. Dalam konteks Papua dan NTT, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah perkotaan tidak mampu mentransmisikan efek kesejahteraan secara proporsional ke daerah terpencil. Dengan demikian, ketimpangan infrastruktur berfungsi sebagai saluran struktural yang menghubungkan disparitas pembangunan dengan kesenjangan pendapatan.

Perangkap Kemiskinan (Poverty Trap) dan Dinamika Pengangguran

Ketimpangan pembangunan yang berkepanjangan menciptakan kondisi poverty trap di wilayah tertinggal. Keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menghambat produktivitas tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat sulit meningkat secara berkelanjutan (Simanjuntak & Solihin, 2025). Rendahnya IPM di Papua dan NTT menjadi indikator bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan belum optimal, yang pada akhirnya membatasi mobilitas sosial.

Tingkat pengangguran terbuka dan terbatasnya lapangan kerja produktif memperparah kondisi tersebut. Studi panel data menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Rasio Gini di Indonesia (Jan et al., 2026). Dalam konteks Papua dan NTT, struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer dengan nilai tambah rendah mempersempit peluang kerja formal. Ketika kesempatan kerja produktif tidak tersedia, masyarakat cenderung terjebak dalam pekerjaan informal dengan pendapatan rendah dan tidak stabil.

Hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan juga bersifat timbal balik. Peningkatan Rasio Gini berkorelasi positif dengan eskalasi tingkat kemiskinan (Diyah & Nafisyah, 2024). Dengan kata lain, ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya mencerminkan perbedaan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah memiliki akses pendidikan yang terbatas, sehingga peluang untuk keluar dari kemiskinan menjadi semakin kecil. Jika dibiarkan berlarut-larut, siklus ketimpangan struktural ini tidak hanya berdampak pada stagnasi ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu sentimen kedaerahan yang dapat mengancam stabilitas politik dan sosial dalam jangka panjang (Kebijakan & Data, 2025).

Solusi Kebijakan Untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif dan Intervensi Fiskal

Menghadapi kompleksitas tersebut, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada inclusive growth menjadi prasyarat utama. Pembangunan inklusif menekankan integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan guna memastikan manfaat pertumbuhan dapat dinikmati secara lebih merata (Susilowati et al., 2025). Dalam konteks Papua dan NTT, strategi ini perlu diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas modal manusia.

Selain itu, konsep inclusive green growth relevan diterapkan di wilayah dengan kekayaan sumber daya alam seperti Papua. Pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dapat mencegah eksploitasi berlebihan yang justru memperdalam ketimpangan

(Asyrof & Rizaldi, 2025). Integrasi kebijakan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan memungkinkan terciptanya lapangan kerja baru yang produktif sekaligus berkelanjutan.

Intervensi fiskal juga memiliki peran strategis dalam mereduksi ketimpangan. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa instrumen fiskal seperti bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap penurunan Rasio Gini di tingkat provinsi (Sabila et al., 2025). Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini serta dana otonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas tata kelola lokal. Faktor kelembagaan dan ketepatan sasaran administrasi menjadi prasyarat mutlak (Sarjito, 2024). Desentralisasi fiskal di Papua dan NTT harus dievaluasi agar alokasi anggaran benar-benar menysasar sektor prioritas secara proporsional, bukan sekadar terjebak pada inefisiensi birokrasi yang justru memperparah divergensi ekonomi (Mursalin & Irawan, 2025).

Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Papua dan NTT bukan sekadar akibat perbedaan geografis, melainkan hasil interaksi kompleks antara keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas SDM, kegagalan transmisi pertumbuhan, serta lemahnya kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, transformasi menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan menjadi agenda strategis untuk memutus mata rantai kesenjangan pendapatan di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum merata antarwilayah, terutama antara wilayah barat dan timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketimpangan pembangunan ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang produktif. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat di wilayah tertinggal sulit meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya, sehingga kesenjangan pendapatan antarwilayah terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jaringan telekomunikasi, pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengembangan lapangan kerja berbasis potensi daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran pembangunan secara tepat sasaran agar program yang dijalankan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal. Upaya-upaya yang realistis ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan pendapatan antarwilayah secara bertahap.

DAFTAR REFERENSI

- Al Sharjabi, S. J., Al Jawaldeh, A., Hassan, O. E. H., & Dureab, F. (2024). Understanding the food and nutrition insecurity drivers in some emergency-affected countries in the Eastern Mediterranean Region from 2020 to 2024. *Nutrients*, 16(22), Article 3853. <https://doi.org/10.3390/nu16223853>
- Aprillia, Y. T., Sari, F., Jannah, M., & Putri, N. D. (2022). Edukasi pembuatan dapur MPASI darurat bencana. *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)*, 6(1). <https://doi.org/10.52643/pamas.v6i1.1912>
- Asyrof, R. A., & Rizaldi, M. (2025). Regional inclusive green growth in Indonesia. *Indonesian Journal of Energy*, 8(1), 75-86. <https://doi.org/10.33116/ije.v8i1.220>
- Awalia, R. P. R., Kamaruddin, C. A., Samsir, A., Irwandi, I., & Abd. Rahim. (2024). Wadah harmoni kebijakan pusat dan daerah dorong pariwisata melalui medsos. *Dep. Komun. Bank Indones., Pp., 10(2018), 1-32.* <https://doi.org/10.33197/jabe.vol10.iss02.2024.1954>
- Di, M., Nusa, P., & Timur, T. (2025). Eksplorasi ketimpangan dan klusterisasi pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berperan aktif dalam mendukung. *April*.
- Diyah, A., & Nafisyah, D. (2024). The influence of the Gini ratio, government. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 83-97. <https://doi.org/10.14710/djieb.24288>
- Fatimah, A., Rahayu, N. P., Ekonomi, P., & Yogyakarta, U. A. (2024). Analisis pengaruh kesenjangan infrastruktur terhadap pendahuluan. *Infrastruktur merupakan lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Penelitian Ramírez dan Esfahani*, 6(1), 34-49. <https://doi.org/10.33369/convergencejep.v6i1.33160>
- Indah Nidyawati, L., Hakim, L., & Sarjiyanto, S. (2024). Infrastructure development policy and economic development inequality among regions in Indonesia. *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, 3(07), 900-905. <https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i7n10>
- Indeks, P., Kabupaten, I., & Di, K. (2025). Perkembangan indeks inklusif kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5(2), 55-72. <https://doi.org/10.64930/jstar.v5i2.119>
- Jan, N., Aprilia, D., Rifan, D. F., & Rahman, T. (2026). Determination of the Gini ratio in Indonesia in 2020-2024: A panel data study of 10 provinces. 9(1), 123-137.
- Kebijakan, P., & Data, B. (2025). Analisis ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021-2024 dan berperan aktif dalam mendukung antarkabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mursalin, D., & Irawan, T. (2025). Menyeimbangkan pertumbuhan, pemerataan, dan kewilayahan: Dilema desentralisasi dalam pembangunan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 58-82. <https://doi.org/10.29244/jekp.14.1.2025.58-82>
- Pandina, F. D. (2023). Factors affecting poverty in East Nusa Tenggara Province in 2017-2022. 12(04), 2348-2353.
- Rachmawati, L. N., Lubis, F. R. A., & Azzakiyyah, N. A. (2025). Regional income disparities in Indonesia: Insights from the Williamson index and panel data analysis. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 15(2), 264-271. <https://doi.org/10.12928/optimum.v15i2.12953>

- Rahayu, D., & Muta'ali, L. (2024). Spatial pattern of shifting rural growth center in Kulon Progo Regency. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 8(3), 197-212. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/p2wd/article/view/55364>
- Sabila, P., Febriane, N., Inayah, K., Destiani, W., Fattah, M. A., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2025). Peran bantuan sosial dalam mengurangi ketimpangan antar 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2018-2024. *Indonesian Journal of Economics*, 2(7), 1944-1950.
- Sarjito, A. (2024). Efektivitas kebijakan sosial dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan angka kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 6(2), 1-12. <https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.90>
- Simanjuntak, R. S., & Solihin, A. (2025). The effect of infrastructure and economic growth on poverty reduction in Indonesia. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 6(3), 1142-1155. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v5i3.7583>
- Susilowati, D., Suman, A., Susilo, S., & Prasetyia, F. (2025). Inclusiveness of economic development in the multidimensional perspective in provinces in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 26(2), 360-384. <https://doi.org/10.18196/jesp.v26i2.27485>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Hoboken, NJ: Pearson.